ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH MELALUI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PADANG

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

AYU ANRIANI

2019/ 19233021

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH MELALUI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PADANG

Nama	: Ayu Anriani
Nim	: 19233021
Program Studi	: Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas	: Ekonomi

Padang, Oktober 2022

Disetujui Oleh :

Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Chichi Andriani, SE.,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Dessi Susanti S.Pd, M.Pd
NIP. 19800112 200312 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH MELALUI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PADANG

Nama	: Ayu Anriani
Nim	: 19233021
Program Studi	: Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas	: Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Oktober 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Dessi Susanti, S. Pd, M. Pd	(Ketua)	
2. Hendri Andi Mesta, SE, MM.Ak	(Anggota)	
3. Rizki Sri Lasmini, SE, MM	(Anggota)	

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ayu Anriani
Thn. Masuk/NIM	: 2019/ 19233021
Tempat/Tgl. Lahir	: Padang/ 30 Juni 2001
Program Studi	: Manajemen Pajak
Keahlian	: Diploma III
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Jln. Bakti Abri No.32 Rt 01 Rw 01 Kec.Koto Tangah Kel.Batang Kabung Ganting Kota Padang
Judul Tugas Akhir	: Analisis Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Oktober 2022
Yang menyatakan,

Ayu Anriani
NIM. 19233021

ABSTRAK

Ayu Anriani **:Analisis Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Padang**

Pembimbing : Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd

Penelitian ini membahas mengenai strategi Pemerintah Kota Padang melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kantor SAMSAT dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor untuk terus meningkatkan dan dapat terus menjadi tumpuan penerimaan pendapatan daerah Kota Padang dikarenakan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang sangat potensial. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan strategi tersebut seperti bagaimana bentuk strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang dan menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi dalam menerapkan strategi tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara, dan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini adalah : Berdasarkan Hasil Analisis SWOT mengenai Analisis Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi faktor internal (kekuatan dan kelemahan). Adapun Strategi *Kekuatan (Strengh)* yaitu peningkatan pelayanan lapangan, pengawasan pemeriksaan pajak, dan penyederhanaan administrasi. Kemudian yang menjadi *kelemahan (weakness)* yaitu masih adanya wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya sehingga menimbulkan loss PKB. Adapun Faktor Eksternal (peluang dan ancaman) nya yaitu *peluang (opportunity)* dengan melakukan penjaringan wajib pajak baru. Sedangkan *ancaman (threats)* nya yaitu masih kurangnya pemahaman wajib pajak dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Strategi, Pendapatan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "**Analisis Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Padang**". Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam bentuk moril maupun materil serta selalu memberikan motivasi kepada penulis hingga semangat yang tiada henti.

3. Kepada Keluarga yaitu Ibuk, Ayah, Serta Adik-Adik Penulis yang sangat penulis cintai sehingga penulis selalu bersemangat dalam menjalani Tugas Akhir.
4. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Dr. Idris,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Chichi Andriani,SE.MM selaku ketua prodi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Ibu Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Abror, S.E, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Seluruh Staf dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Kepala UPTD PPD SAMSAT Kota Padang beserta staff dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama melakukan observasi.

11. Keluarga Besar Manajemen Pajak 2019 yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Rekan Seperjuangan adinda afrida, dinda indri, alfina, al hafid, Rani, Rahma Nila serta semua teman teman semua yang saling memberikan dukungan satu sama lain, sukses terus untuk kalian, jangan pernah menyerah dalam menghadapi hal-hal sulit dan sampai bertemu lagi dilain kesempatan.
13. Kepada Eko Putra Soni terimakasih sudah menemani penulis hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
14. Last but not least, diri sendiri yang mampu bertahan menghadapi badai perkuliahan ini dan terus berjuang ditahap-tahap selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan Tugas Akhir ini. Mudah-mudahan Tugas Akhir ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, Oktober 2022

Ayu Anriani
NIM. 19233021

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR ..... **ii**
PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
A. Strategi 10
1. Pengertian Strategi 10
2. Implementasi Strategi 12
3. Evaluasi Strategi dan Pengawasan 13
B. Analisis SWOT 16
C. Komponen Analisis SWOT 17
D. Pendapatan Asli Daerah 18
E. Pajak Daerah 19
F. Pajak Kendaraan Bermotor 23
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 23
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) . 25
3. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor 25

4. Bukan Objek Kendaraan Bermotor 26
5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 26
6. Saat Terhutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan PKB 28
7. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor 29
G. Optimalisasi Pajak 30
BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Bentuk Penelitian 39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 39
1. Lokasi Penelitian 39
2. Waktu Penelitian 39
C. Rancangan Penelitian 40
1. Jenis Penelitian 40
2. Tahapan Penelitian 40
3. Objek Penelitian 42
4. Sumber Data 42
5. Teknik Analisis data 43
BAB IV PEMBAHASAN 45
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 45
1. Sejarah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (SAMSAT) Kota Padang 45
2. Profil Kantor SAMSAT Kota Padang 48
3. Visi dan Misi dan Moto SAMSAT Kota Padang 48
4. Struktur Organisasi SAMSAT Kota Padang 49
5. Unit Kerja 50
B. Pembahasan 52
BAB V KESIMPULAN 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN 64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Padang Tahun 2019 - 2021 3

Tabel 1.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dengan Dana bagi hasil dari pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Tahun 2019 - 2021 4

Tabel 1.3 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dari Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Padang Tahun 2019 – 2021 5

Tabel 1.4 Realisasi Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2021-2022 7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Padang **.....49**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelian dari Kampus

Lampiran 2 Surat Izin Penelian dari Kampus

Lampiran 3 Surat Balasan DPMPTSP

Lampiran 4 Surat Balasan DPMPTSP

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

Lampiran 6 Pedoman Wawancara

Lampiran 7 Pedoman Wawancara

Lampiran 8 Pedoman Wawancara

Lampiran 9 Transkip Wawancara dengan Frans Sanjaya

Lampiran 10 Transkip Wawancara dengan Rianda Putra

Lampiran 11 Transkip Wawancara dengan Okki Trinanda, S.E,M.M

Lampiran 12 Transkip Wawancara dengan Syaherman

Lampiran 13 Transkip Wawancara dengan Mawardi

Lampiran 14 Transkip Wawancara dengan Nurdin

Lampiran 15 Dokumentasi Penulis

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pemerintah Indonesia resmi menerapkan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian hingga kini, di mana pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah semakin meningkat dengan adanya pemberian kewenangan dan hak dari pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangganya sendiri sebagai sebuah akibat dari pengalihan urusan pemeritahan pusat kepada pemerintahan daerah secara nyata, luas, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah dapat menjadi pembuktian daerah untuk memperlihatkan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah lokal sesuai dengan keinginan, kebutuhan, serta sumber daya masyarakat daerah. Hal ini perlu diantisipasi, agar kinerja pemerintah daerah dapat meningkat secara signifikan dalam

mengurus rumah tangga daerah dan pelayanan kepada masyarakat daerah. Namun, pemerintah pusat tetap melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Maka dari itu, dalam rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat dan keleluasaan berprakarsa serta berkreasi dari pemerintah daerah.

Dengan otonomi daerah, efisiensi pemerintah pusat meningkat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.Pelimpahan kekuasaan administrasi dan politik dalam rangka penyediaan layanan publik didukung dengan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah daerah. Hal itu diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. (https://djpb.kemenkeu.go.id/, 2022).

Untuk dapat melaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya melalui sumber-sumber keuangannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 3, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain penerimaan yang sah. Dengan adanya otonomi daerah tersebut diharapkan semua daerah di Indonesia bertumpu pada PAD yang dimiliki oleh setiap daerahnya untuk melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. hal inilah

yang menuntun daerah untuk mengoptimalkan PAD melalui Komponen-komponennya.

Untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya Pemerintah Kota Padang membutuhkan dana untuk menjalankan pembangunan daerah dan kegiatan pemerintahannya, yaitu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Terdapat berbagai macam dana yang didapatkan oleh Kota Padang. Sebagai salah satu daerah otonom, Kota Padang masih bergantung pada dana perimbangan yang bersumber dari dana alokasi dan dana bagi hasil atas penerimaan pajak dari pemerintah pusat serta dana bagi hasil atas penerimaan pajak dan retribusi dari pemerintah daerah tingkat provinsi seperti terlihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Padang Tahun 2019-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
2019	2.328.432.873,69	4.027.349.115,49	34.555.215.40
2020	2.255.072.985.43	4.002.468.880.94	106.523.889.88
2021	2.552.871.212.67	4.077.706.774.34	76.465.844.74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang

Tabel 1.1 menunjukan bahwa selama tahun 2019-2021 Kota Padang masih bergantung pada Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah

pusat. Dana Perimbangan mendominasi pendapatan Kota Padang dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sehingga pemerintah Kota Padang masih kurang leluasa untuk menentukan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat daerah. Namun, Pemerintah daerah Kota Padang terus mengupayakan kemandirian pembiayaan daerah dengan terus mengembangkan pendapatan daerahnya seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun sumber pendapatan daerah yang lain guna mengurangi ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat.

Sumber pembiayaan daerah bukan hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan saja namun terdapat sumber pembiayaan lain salah satunya adalah Pajak Daerah. Pendapatan Pajak Daerah Kota Padang tahun 2019 sampai dengan 2021 menunjukkan jumlah yang besar bahkan lebih besar dari pada pendapatan Dana bagi hasil dari pajak provinsi dan pemerintah daerahyang dipungut di Kota Padang.

Tabel 1.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dengan Dana bagi hasil dari pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2021 :

Tahun	Pajak Daerah	Dana bagi hasil dari pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah
2019	1.872.933.990.72	108. 375. 673,68
2020	1.809.809.963.05	108. 375. 673,68
2021	2.060.852.029.36	93 .169. 965,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang

Tabel 1.2 diatas memperlihatkan bahwa selama tiga tahun terakhir anggaran perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Padang. Terlihat

bahwa Pajak Daerah memiliki kontribusi paling besar dibandingkan dengan Dana bagi hasil dari pajak provinsi dan pemerintah daerah Kota Padang per tahunnya. Didalam Pajak Daerah terdiri dari pendapatan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang menjadi kesatuan dalam Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang potensial di Wilayah di Kota Padang bagi penerimaan daerah Kota Padang, hal ini dikarenakan di Kota Padang banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dalam melakukan segala aktivitasnya. Selain itu jumlah penerimaan kendaraan di Kota Padang mengalami peningkatan yang signifikan atas peredarannya. Tabel berikut akan memperlihatkan peningkatan jumlah penerimaan kendaraan di Kota Padang.

Tabel 1.3 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dari Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Padang Tahun 2019 – 2021

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Nominal Pendapatan
2019	403.725	334.185.142.800
2020	292.704	280.148.820.850
2021	288.129	299.864.529.900

Sumber: Samsat Kota Padang

Tabel 1.3 tersebut menjelaskan banyaknya jumlah kendaraan dari berbagai jenis di Kota Padang seperti kendaraan roda dua atau motor, kendaraan roda empat atau mobil, kendaraan transportasi umum, dan kendaraan roda lebih dari empat atau mobil besar seperti, truk, bus, dan lain-lainnya. Melihat kenaikan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2020-2021 tersebut perlunya upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya dalam pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, sehingga kuantitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang menjadi faktor meningkatnya peneriman PKB yang terus meningkat setiap tahunnya.

Dalam rangka mengupayakan kemandirian pembiayaan daerah dengan terus meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya sendiri seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak maupun sumber pendapatan daerah yang lain bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Pendapatan Pajak kendaraan bermotor di Kota Padang berasal dari Pajak Daerah dan untuk penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah. Didalam Pajak Daerah itu sendiri, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi penyumbang terbesar dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.4 Realisasi Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2021-2022

No	PAJAK DAERAH	2021	2022
1	PKB	705.386.114.000	765.763.142.000
2	BBNKB	290.367.204.000	331.174.548.000
3	PBBKB	446.950.135.000	504.297.642.000
4	PAP	9.050.540.000	10.231.551.000
5	ROKOK	369.500.000.000	402.975.000.000
	JUMLAH	1.821.253.993.000	2.014.441.883.000

Sumber: Bapenda Sumatera Barat

Dari tabel 1.4 di atas, menunjukkan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021-2022 terhadap penerimaan di Kota Padang sangatlah potensial dan penting bagi pembagunan di Kota Padang karena Dalam Pajak Daerah itu sendiri yang mendominasi pendapatanya ada pada penerimaan PKB. Kemudian jika melihat potensi PKB yang dimiliki Kota Padang dari Pertumbuhan jumlah kuantitas penerimaan kendaraan yang selalu meningkat tiap tahunnya tentunya dapat membuat penerimaan PKB juga meningkat. Namun, kenyataan yang ada dilapangan disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat, bahwa masih terdapatnya PKB yang belum dibayar oleh pemiliknya sebesar 10%. Sehingga masih terdapat potensi penerimaan PKB yang dapat di optimalkan oleh Pemerintah Kota Padang melalui berbagai strategi optimalisasi yang dapat dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang "**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Padang dalam usahanya meningkatkan Pendapatan Daerah melalui pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apa kendala strategis pemerintah kota Padang dalam usahanya meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian yang tercermin dalam rumusan permasalahan diatas yaitu :

1. Menganalisis strategi Pemerintah Kota Padang dalam usahanya meningkatkan Pendapatan Daerah melalui pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Menganalisis kendala/hambatan strategis pemerintah kota padang dalam usahanya meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

   Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan di bidang perpajakan mengenai pajak daerah terutama pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti wajib pajak kendaraan bermotor, pemerintah Kota Padang, serta para pihak yang berwenang dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.